

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 12 February 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 3	Rabu, 12 February 2020	Tawaran Peminat Asing Terus Dikaji	Pemerintah masih menunggu realisasi investasi yang sudah disampaikan sejumlah calon pemodal asing untuk ikut menggarap proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Selasa (11/2) bahwa sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN.
2	Bisnis Indonesia Halaman 21	Rabu, 12 February 2020	Mendamba Kota Canggih nan Ramah Lingkungan	Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Negara (KLHS IKN) mulai disusun sejak September dan rampung pada Desember 2019.
3	Bisinis Indonesia Halaman 21	Rabu, 12 February 2020	Tarif Tol Tangerang Naik	Sejumlah Kendaraan memasuki gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (11/2). Tarif tol Tangerang akan naik berkisar antara Rp500 hingga Rp12.000 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 70/KPTS/M/2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ruas Tangerang-Merak per 12 February 2020.
4	Media Indonesia Halaman 11	Rabu, 12 February 2020	Berdaya Karena Tangan Swasta	Ada yang berbeda saat Jembatan Kanal Antang di Sei Puting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mulai dioperasikan, akhir pekan lalu. Tak kurang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mengungkapkan perbedaan itu saat meresmikannya.

Judul	Tawaran Peminat Asing Terus Dikaji	Tanggal	Rabu, 12 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 3		
Resume	Pemerintah masih menunggu realisasi investasi yang sudah disampaikan sejumlah calon pemodal asing untuk ikut menggarap proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Selasa (11/2) bahwa sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN.		

| IBU KOTA BARU |

Tawaran Peminat Asing Terus Dikaji

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah masih menunggu realisasi investasi yang sudah disampaikan sejumlah calon pemodal asing untuk ikut menggarap proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Selasa (11/2) bahwa sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN.

Sebut saja dari Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Denmark, Italia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan

China. Namun, pemerintah yang mewakili para investor asing tersebut baru mengutarakan minat dan belum memaparkan konsep detail kepada Pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga masih mempelajari berbagai skema kerja sama yang ditawarkan, khususnya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung (*foreign direct investment*/FDI).

Investasi berskema KPBU dan swasta ditargetkan menjadi sumber utama untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Berdasarkan data Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah memetakan tiga sumber dana untuk membiayai IKN, yaitu Rp89,4 triliun dari APBN, Rp253,4 triliun dari skema KPBU, dan Rp123,2 triliun dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD.

Jenis sumber pembiayaan yang bisa digunakan, yaitu ekuitas (penanaman modal asing/dalam negeri, investor pasar modal), pinjaman (perbankan asing/dalam negeri), dan obligasi korporasi (investor pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan reksa dana).

Beberapa opsi skema KBPU yang dapat diterapkan yaitu, *availability payment* atau tarif/*user charge* dan bentuk lain-

nya. Dalam pelaksanaan aset skema *availability payment*, pemerintah memiliki berbagai pilihan pemanfaatan aset, yaitu *build operate transfer* (BOT), *build transfer operate* (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

Lebih jauh Suharso mengatakan untuk kebutuhan terkait dengan pemerintahan memang didorong pengerjaannya oleh pihak Indonesia sendiri. Adapun dalam mendorong kerja sama antara investor asing dan pihak perusahaan swasta serta BUMN, dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama. (Feni Freyrcinetia/Agne Yasa)

Judul	Mendamba Kota Canggih nan Ramah Lingkungan	Tanggal	Rabu, 12 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Negara (KLHS IKN) mulai disusun sejak September dan rampung pada Desember 2019.		

| IBU KOTA NEGARA BARU |

MENDAMBA KOTA CANGGIH NAN RAMAH LINGKUNGAN

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara Kalimantan Timur harus tetap menjaga keasrian lingkungan, kendati berkonsep *smart city* berteknologi canggih.

Aqne Yasa & Aprianus Doni T.
redaksi@bisnis.com

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ibu Kota Negara (KLHS IKN) mulai disusun sejak September dan rampung pada Desember 2019.

Ibu strategis yang dibahas di antaranya soal ekosistem hutan dan dampaknya kepada keanekaragaman hayati di IKN. Kemudian terkait ketersediaan air, termasuk dalam konteks kemarau berkepanjangan yaitu kelangkaan air.

“Air ini otomatis jadi isu strategis yang kami sorot, mengapa? Dari proses konsultasi publik semua yang disuarakan adalah air. Baru kemudian soal sawah dan pendapat masyarakat setempat,” jelasnya, dalam Dialog Nasional VI Pemindahan Ibu Kota Negara, di Bappenas, pada Selasa (11/2).

Dia menjelaskan beberapa informasi penting temuan KLHS IKN ini yaitu terkait karakteristik Kalimantan Timur dan Pulau Kalimantan, dari sisi geografi, morfologi, dan lainnya. Kemudian dari sisi dampak sosial ekonomi dan lainnya. Walaupun kaya dengan sumber daya alam, ujarnya, terdapat limitasi terutama terkait ekologis di Kalimantan.

Dari KLHS, imbuhnya, menyimpulkan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Rekomendasi KLHS IKN tersebut memuat 10 prinsip *smart & forest city*, empat

Ibu Kota Baru Berbasis Forest City

Pemerintah sudah mencanangkan pemindahan ibu kota baru yang lokasinya dipastikan di Kalimantan. Proses pembangunan ibu kota baru yang berbasis Forest City tersebut butuh tiga tahapan dengan periode 2021 hingga 2045.



usulan kebijakan untuk dukungan keberlanjutan, lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan, serta empat kebutuhan *feasibility study* lanjutan.

Dosen Universitas Gadjah Mada Bagus Pujilaksmono mengatakan diperlukan kajian lanjutan lebih lanjut untuk memikirkan skenario terhadap kondisi paling ekstrem soal penyediaan air.

“Perlu skenario yang paling ekstrem untuk ketersediaan air, karena air tanah dan air permukaan tidak banyak. Perlu memikirkan kondisi yang paling ekstrem,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Laksmi menjelaskan ketika memutuskan melakukan *focusing study* tentang air, pihaknya mengakui memang baru di fase pertama dan data itu belum detail sehingga studi kelayakan lanjutan diperlukan. “Harus diikuti PS berikutnya supaya datanya lebih valid,” ujarnya.

Dia menambahkan berbicara air, terdapat pasokan dan kebutuhan, baik di level umum maupun individu. Namun, dari hasil kajian untuk air tanah dari sisi karakteristik geologi tidak me-

ungkinkan dimanfaatkan dan sulit untuk diinvestasikan karena terlalu mahal.

“Maka pilihannya adalah kepada air permukaan, ketika melihat ini harus lihat kestabilan sumber daya sehingga diputuskan sistem air permukaan di lokasi sangat bergantung pada hujan. Jadi kita tidak berbicara suplai sumber yang selalu ada,” jelasnya.

Terkait pengolahan sampah, Laksmi mengatakan pemerintah akan menerapkan konsep pengurangan timbulan yakni mereduksi tingkat konsumsi rumah tangga yang berpotensi menghasilkan sampah, melalui pembuatan regulasi.

Selain itu, untuk mengimplementasikan konsep *smart city* IKN terkait pengolahan sampah, Laksmi menilai sudah banyak contoh pengelolaan sampah dengan teknologi mutakhir dan bisa diadaptasi di IKN.

Ahli biodiversity dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Paulus Matus menambahkan bahwa cara mengolah sampah organik yang memungkinkan diterapkan di IKN yakni dengan cara dibakar.

“Mau tidak mau harus dibakar [sampah] yang organik. Terkait asap yang ditimbulkan, itu bisa dijejaskan ke laut. Itu ada teknologi khusus agar [asap] pembakaran sampah tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Kelaurutan gas di air, lanjutnya, sangat rendah. Namun dengan volume air laut yang besar maka tidak akan menjadi masalah.

Isu strategis yang dibahas di antaranya soal ekosistem hutan dan dampaknya kepada keanekaragaman hayati di IKN.

kinan respons dari perusahaan tambang. Pertama, perusahaan akan minta kompensasi deposit batu bara yang tersisa, kedua, perusahaan meminta *land swap*.

“Land swap ini artinya perusahaan tambang minta diberi izin membuka tambang baru di lahan di kawasan lain. Kalau begitu malah pemindahan Ibu Kota justru secara tidak langsung bisa berdampak buruk bagi lingkungan di kawasan lain,” katanya.

Selain itu, dia pun mengimbau agar pemerintah memperhitungkan instrumen-instrumen yang akan berpindah ke Ibu Kota baru seperti penduduk, kegiatan industri, dan ekonomi yang bisa berdampak pada lingkungan.

“Jangan sampai kesalahan yang sama di Jakarta terulang kembali di IKN,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Suharto Monarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan bahwa semua kajian dan masukan terkait ibu kota negara akan ditindaklanjuti agar terwujudnya IKN yang ideal.

“Selama ini belum ada yang ibu kota pindah pulau, kita yakin IKN Indonesia nanti jadi yang terbaik,” ujarnya.

Dia menambahkan semua hal yang diperdebatkan terkait IKN akan dipertimbangkan. Termasuk soal kajian lingkungan hidup. Semua kajian dan pertimbangan menjadi masukan yang baik untuk masterplan IKN.

“Tentu kita tidak bikin hutan beton. Kami juga mengembalikan dan pulihkan fungsi hutan seperti Bukit Soeharto,” katanya.

Dia menambahkan IKN yang akan datang mudah-mudahan bernuansa teknologi nan canggih dengan penggunaan energi baru dan terbarukan.

“Tentu kita tidak ingin membuat pembangunan IKN ini jadi gap, tapi *trendsetter* untuk seluruh kota-kota di Indonesia, yang *sustain*, dan ramah lingkungan,” katanya. ■

LOBANG TAMBANG

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritisi penanganan ratusan lobang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan calon Ibu Kota Negara. Pencegahan timbulnya lubang baru harus menjadi fokus pemerintah.

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zeni Suhadi mengatakan bahwa selain mereklamasi lubang bekas tambang, pemerintah juga harus memperhatikan penanganan konsorsium pengusaha tambang secara tepat.

“Dalam catatan kami, terdapat 141 izin tambang aktif dan sekarang beroperasi. Kalau pemerintah tidak menyiapkan skenario penanganannya maka bisa jadi kita menutup 109 lubang tetapi nanti akan muncul lubang-lubang baru dari 141 izin tambang tersebut,” ujarnya.

Pemerintah, katanya, harus memutuskan apakah akan mencabut izin tambang-tambang tersebut atau tidak. Menurutnya, jika izin dicabut maka ada dua kemung-



Antara

Judul	Tarif Tol Tangerang Naik	Tanggal	Rabu, 12 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Sejumlah Kendaraan memasuki gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (11/2). Tarif tol Tangerang akan naik berkisar antara Rp500 hingga Rp12.000 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 70/KPTS/M/2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ruas Tangerang-Merak per 12 February 2020.		

■ TARIF TOL TANGERANG NAIK



Antara/Muhammad Iqbal

Sejumlah kendaraan memasuki gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (11/2). Tarif tol Tangerang akan naik berkisar antara Rp500 hingga Rp12.000 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 70/KPTS/M/2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Ruas Tangerang-Merak per 12 Februari 2020.

Ba

Judul	Berdaya Karena Tangan Swasta	Tanggal	Rabu, 12 February 2020
Media	Media Indonesia Halaman 11		
Resume	Ada yang berbeda saat Jembatan Kanal Antang di Sei Puting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mulai dioperasikan, akhir pekan lalu. Tak kurang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mengungkapkan perbedaan itu saat meresmikannya.		



JEMBATAN KANAL ANTANG: Warga melakukan aktivitas di Jembatan Kanal Antang di Sungai Puting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang diresmikan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Sabtu (8/2). Keberadaan jembatan yang dibangun melalui dana CSR perusahaan PT Antang Gunung Meratus (AGM) senilai Rp66,5 miliar tersebut diharapkan mampu membuka akses dan mendorong ekonomi masyarakat pinggiran di Kalsel.

Berdaya karena Tangan Swasta

Dana ratusan miliar dikucurkan perusahaan untuk membangun jalan dan jembatan. PT Antang mengoperasikan jembatan senilai Rp66,5 miliar.

DENNY SUSANTO
denny_susanto@mediaindonesia.com

ADA yang berbeda saat Jembatan Kanal Antang di Sei Puting, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mulai dioperasikan, akhir pekan lalu. Tak kurang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang mengungkapkan perbedaan itu saat meresmikannya.

"Baru pertama kali ini saya meresmikan sarana dan prasarana di jalan nasional yang dibangun pengusaha lewat program CSR. Biasanya pembangunan jembatan menggunakan APBN atau kerja sama pemerintah dan badan usaha," ujar Menteri.

Jembatan Kanal Antang sangat vital bagi warga di dua kabupaten, yaitu Barito Kuala dan

Tapin. Jembatan ini dibangun dengan dana mencapai Rp66,5 miliar.

Tidak ada dana APBN atau APBD yang dikeluarkan. Perusahaan batu bara PT Antang Gunung Meratus membiayai seluruh kebutuhan pembangunannya.

Seperti diungkapkan Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyarto, jembatan ini semula merupakan bagian dari jalan khusus dalam aktivitas industri batu bara. Untuk menghilangkan pelintasan sebidang yang menghambat lalu lintas dan memperlancar distribusi hasil pertambangan, pada 2017 diteken perjanjian kerja sama dengan empat perusahaan batu bara. "Mereka akan membangun 3 *overpass* dan 1 jembatan," tambahnya.

Total biaya pembangunan jembatan dan 3 *overpass* itu

mencapai Rp189 miliar. Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus, Dody Imam Hidayat, menyatakan panjang total jalan penghubung dan Jembatan Kanal Antang berkonstruksi baja itu mencapai 500 meter.

"Jembatan Sungai Puting ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Keberadaannya sangat penting bagi kelancaran transportasi dan peningkatan ekonomi masyarakat," tandas Dody.

Bupati Tapin M Arifin Arpan memuji kesungguhan PT Antang dan perusahaan lain. "Karena perusahaan, akses masyarakat semakin terbuka."

Semen Gresik

Di Jawa Tengah, Kabupaten Blora dan Rembang, juga merasakan sentuhan dana CSR dari sejumlah perusahaan. Jalan penghubung kedua kabupaten itu sudah sangat mulus, berbeton dilapisi aspal. Alun-alun Rembang juga tampil indah, tertata rapi, dan tetap menempatkan pedagang kaki lima dengan tertib.

Di dua kabupaten itu, dana CSR digelontorkan PT Semen Gresik, PT Pertamina, dan sejumlah perusahaan swasta lainnya. "Kami sudah mengucurkan dana CSR sebesar Rp17,2 miliar sepanjang 2019. Sebagian besar untuk memajukan desa sekitar," ujar juru bicara PT Semen Gresik Gatot Mardiana.

Pembangunan infrastruktur juga terus dipacu di sejumlah daerah. Kabupaten Brebes sudah mencanangkan pembangunan kawasan industri dengan anggaran mencapai Rp13 triliun. "Dengan anggaran itu, serta terbangunnya kawasan industri, pertumbuhan ekonomi Brebes bisa terdorong hingga 7%," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Edy Kusmartono.

Tahun ini, Pemprov Sumatra Selatan sudah mengalokasikan dana sekitar Rp1 triliun untuk perbaikan jalan. "Tahun ini, jalan provinsi kami targetkan mulus seluruhnya," tandas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Darma Budhy. (AS/JI/DW/UL/AD/N-2)